RUU OMNIBUS LAW (CIPTA LAPANGAN KERJA)

AKD: RUU OMNIBUS LAW (CIPTA LAPANGAN KERJA)

Bulan: Agustus 2020

Oleh: RUU OMNIBUS LAW (CIPTA LAPANGAN KERJA)

GAMBAR

PERPUSTAKAAN DPR RI

Telepon : (021) 5715876, 5715817, 5715887
Fax : (021) 5715846
e-mail: perpustakaan@dpr.go.id
Web: perpustakaan.dpr.go.id

LAPORAN WORLD BANK

World Bank: Omnibus Law Cipta Kerja Berpotensi Merugikan Ekonomi

Muhamad Wildan, Minggu, 2 Agustus 2020, 06.01 WIB

JAKARTA, DDTCNews - World Bank menilai terdapat beberapa klausul dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang berpotensi merugikan ekonomi Indonesia, berbanding terbalik dengan tujuan rancangan beleid tersebut yang hendak meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi.

Hal ini disampaikan oleh World Bank dalam laporan perekonomian Indonesia yang dirilis Juli ini dengan judul *Indonesia Economic Prospects: The Long Road to Recovery* . Tiga poin yang disorot oleh World Bank adalah klausul mengenai ketenagakerjaan, perizinan, dan lingkungan.

"Revisi terhadap UU Ketenagakerjaan dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja memiliki potensi mengurangi perlindungan yang diberikan terhadap pekerja," tulis World Bank dalam laporannya, dikutip Rabu (29/7/2020).

Baca Juga: Wamenkeu: Skema PPh Final Kontruksi dan Real Estate Bakal Dievaluasi

Menurut World Bank, skema upah minimum terbaru serta pembayaran pesangon yang lebih longgar dibandingkan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan berpotensi memperlemah perlindungan terhadap tenaga kerja serta meningkatkan ketimpangan penerimaan.

Pada Pasal 88D, penentuan upah minimum yang akan ditetapkan hanya memperhitungkan pertumbuhan ekonomi provinsi. Hal ini berbeda dengan ketentuan yang saat ini berlaku dimana upah minimum ditentukan berdasarkan pertumbuhan ekonomi nasional dan inflasi nasional.

Lebih lanjut, Pasal 88E juga mengatur industri padat karya bakal memiliki ketentuan upah minimum tersendiri menggunakan formula tertentu yang tidak diperinci pada RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Baca Juga: World Bank: Belum Ada Bukti Investasi di Indonesia Terhambat Tarif PPh

Terakhir, ketentuan upah minimum tidak diberlakukan atas usaha mikro dan kecil. Pada Pasal 90B tertulis upah usaha mikro dan kecil ditetapkan berdasar kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Yang jelas, kesepakatan upah harus berada di atas garis kemiskinan Badan Pusat Statistik.

Dalam aspek perizinan, World Bank menyorot klausul RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang menghapuskan syarat dalam pemberian izin-izin dari kegiatan berisiko tinggi. Kegiatan seperti usaha farmasi, rumah sakit, pendirian bangunan tidak lagi dikategorikan sebagai kegiatan berisiko tinggi.

Dalam aspek lingkungan, direlaksasinya syarat-syarat perlindungan lingkungan dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja memiliki potensi mengganggu kehidupan masyarakat dan akan berdampak negatif terhadap investasi.

Baca Juga: Perpanjangan Masa Insentif Pajak dan Usulan World Bank Terpopuler

Secara umum, World Bank menilai kegiatan usaha yang selama ini terhambat oleh perizinan dan syarat-syarat terkait

lingkungan sesungguhnya tidak dihambat oleh regulasi, melainkan oleh korupsi dan rumitnya proses administrasi perizinan dan pemenuhan syarat-syarat terkait lingkungan.

Sisi positifnya, World Bank menilai RUU Omnibus Law Cipta Kerja memiliki potensi meningkatkan keterlibatan Indonesia dalam rantai pasok global atau *global value chain*.

Perizinan ekspor impor yang menggunakan pendekatan berbasis risiko bakal mengurangi biaya dan ketidakpastian dalam menyelenggarakan perdagangan internasional.

"Kewenangan perizinan ekspor impor yang digeser dari kementerian teknis kepada pemerintah pusat secara langsung berpotensi mengurangi praktik korupsi yang tersebar di berbagai kementerian," tulis World Bank. (Bsi)

Topik : world bank, Omnibus Law Cipta Kerja, RUU Omnibus Law

JENIS	KETERANGAN	URL
Berita	Baik Buruk Omnibus Law	http://kliping.dpr.go.id/index \n/detail/id/39784
Berita	Finalisasi Omnibus Law: Isu Tenaga Kerja Belum Tuntas	https://epaper.dpr.go.id/index \n/detail/id/10628
Berita	Ketenagakerjaan, ”Omnibus Law”, Libatkan Semua Pihak agar Beri Kepastian	https://epaper.dpr.go.id/index \n/detail/id/10713
Berita	Omnibus Law & Efektivitas Penyaluran Kredit UMKM	https://epaper.dpr.go.id/index \n/detail/id/10679
Berita	Omnibus Law 4.0 Vs Amdal	https://epaper.dpr.go.id/index \n/detail/id/10729
Berita	Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, Jalan Panjang Beleid Sapu Jagat	https://epaper.dpr.go.id/index \n/detail/id/10678
Berita	Omnibus Law Solusi Tingkatkan Ekonomi Usai Pandemi Covid-19	https://epaper.dpr.go.id/index \n/detail/id/11040
Berita	Omnibus Law, Pajak Spektrum Pajak E-dagang dalam ”Omnibus Law”	https://epaper.dpr.go.id/index \n/detail/id/10647
Berita	Omnibus Law, RUU Cipta Kerja Minim Mengantur Sektor Logistik	https://epaper.dpr.go.id/index \n/detail/id/10815
Berita	Perpajakan, “Omnibus Law” dan Asas Teritorial Perpajakan	https://epaper.dpr.go.id/index \n/detail/id/10649
Berita	RUU Cipta Kerja	http://kliping.dpr.go.id/index \n/detail/id/39787
Berita	RUU Cipta Kerja Sektor Pelayaran, Omnibus Law Tak Sentuh Administrasi Pelabuhan	https://epaper.dpr.go.id/index \n/detail/id/10802
Berita	Tanpa Mengubah Prinsip Lingkungan, Omnibus Law LHK Menyederhanakan Prosedur	https://epaper.dpr.go.id/index \n/detail/id/11967
Berita	Tolak Omnibus Law, Buruh Ancam Mogok	http://kliping.dpr.go.id/index \n/detail/id/39866
Berita	Tunda Pembahasan ”Omnibus Law” di Masa Darurat Covid-19	https://epaper.dpr.go.id/index \n/detail/id/11005
Berita	”Omnibus Law” Berperspektif Antikorupsi	https://epaper.dpr.go.id/index \n/detail/id/10811
Jurnal	Arsitektur Penerapan Omnibus Law melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang	https://ejournal.balitbangham. \ngo.id/index.php/kebijakan/arti \ncle/view/926
Jurnal	Konseptualisasi Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahn Regulasi Pertanahan	https://rechtsvinding.bphn.go. \nid/ejournal/index.php/jrv/arti \ncle/view/378
Jurnal	Omnibus Law untuk Menata Regulasi Penanaman Modal	https://rechtsvinding.bphn.go. \nid/ejournal/index.php/jrv/arti \ncle/view/378
Jurnal	Penerapan Omnibus Law dalam Upaya Reformasi Regulasi	http://e-jurnal.peraturan.go.i \nd/index.php/jli/article/view/6 \n02
Jurnal	Penyusunan Undang-Undang di Bidang Investasi: Kajian Pembentukan Omnibus Law di Indonesia	https://ejournal.uksw.edu/refl \neksihukum/article/view/3120
Buku	Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan	http://opac.dpr.go.id/catalog/ \nindex.php?p=show_detail&id=307 \n21&keywords=ketenagakerjaan
Buku	Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia	http://opac.dpr.go.id/catalog/ \nindex.php?p=show_detail&id=253 \n48&keywords=ketenagakerjaan
Buku	Dilematika hukum ketenagakerjaan tinjauan politik hukum	http://opac.dpr.go.id/catalog/ \nindex.php?p=show_detail&id=275 \n07&keywords=ketenagakerjaan
Buku	Himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2015 Jilid I	http://opac.dpr.go.id/catalog/ \nindex.php?p=show_detail&id=304 \n00&keywords=ketenagakerjaan
Buku	Himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2015 Jilid II	http://opac.dpr.go.id/catalog/ \nindex.php?p=show_detail&id=304 \n01&keywords=ketenagakerjaan

Buku	Himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2015 Jilid III	http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&id=304\n02&keywords=ketenagakerjaan
Buku	Hukum kerja : hukum ketenagakerjaan bidang hubungan kerja	http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&id=238\n29&keywords=ketenagakerjaan
Buku	Hukum ketenagakerjaan	http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&id=138\n58&keywords=ketenagakerjaan
Buku	Hukum Outsourcing: Konsep Alih Daya Bentuk Perlindungan dan Kepastian Hukum	http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&id=326\n93&keywords=ketenagakerjaan
Buku	Kebijakan Ketenagakerjaan dalam Perspektif Kesejahteraan	http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&id=329\n59&keywords=ketenagakerjaan
Buku	Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing: Ditinjau dari Konsep Hubungan Kerja Antara Pekerja dengan Pemberi Kerja	http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&id=308\n04&keywords=ketenagakerjaan
Buku	Pemantauan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&id=311\n30&keywords=ketenagakerjaan
Buku	Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia	http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&id=158\n21&keywords=ketenagakerjaan
Buku	Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan	http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&id=223\n58&keywords=ketenagakerjaan
Buku	Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan	http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&id=191\n72&keywords=ketenagakerjaan
Undang-undang & Peraturan	Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan	https://peraturan.go.id/peratu\nran/view.html?id=11e44c4ebeee7\n970b1a5313231363232
Undang-undang & Peraturan	Proses Pembahasan RUU tentang Ketenagakerjaan	http://www.dpr.go.id/arsip/ind\nexlg/id/126
Undang-undang & Peraturan	RUU Cipta Kerja	https://cdn.cnbcindonesia.com/\ncnbc/ruu-tentang-cipta-kerja.p\ndf
Undang-undang & Peraturan	RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian	https://store.kontan.co.id/mem\nber/history
Undang-undang & Peraturan	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	http://www.dpr.go.id/jdih/inde\nx/id/196